



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (INDONESIA COLLEGE OF ECONOMICS)

TERAKREDITASI A

- S1 Akuntansi
- S1 Manajemen
- D3 Akuntansi
- D3 Manajemen Perdagangan

TERAKREDITASI B

- S2 Magister Akuntansi
- S2 Magister Manajemen
- INSTITUSI Perguruan Tinggi

SURAT TUGAS

No : **48/PSDM/STIE/III/2025**
Hal : Sebagai Peserta

Berdasarkan fungsi, tugas pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab, dengan ini menugaskan kepada:

Nama : Nelli Novyarni, S.E., M.Si.
NIDN : 0306117501
Jabatan : Dosen Tetap Yayasan

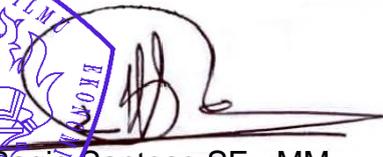
Untuk melaksanakan tugas mengikuti kegiatan:

Nama Kegiatan : Seminar/Webinar : "Mengenal Status Kelembagaan, Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penyusunan Usulan dan Tarif Atas BNPB".
Tanggal Kegiatan : 10 Maret 2025
Penyelenggara : PT Sentra Vidya Utama (SEVIMA)

Demikian surat tugas ini dibuat untuk segera dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 06 Maret 2025

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA


Joko Bagio Santoso, SE., MM
Kepala Bagian PSDM

SEVIMA

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

SERTIFIKAT

No. 440/SRTFK/SVM/II/2025

WEBINAR

**Webinar: Mengenal Status Kelembagaan, Dana
Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penyusunan
Usulan dan Tarif Atas PNB
Senin, 10 Maret 2025 | 13:00-15:00 WIB**

Diberikan kepada:

NELLI NOVYARNI, SE., M.Si., Ak., CSRS., CSRA., CSP., C.NSP

Atas partisipasinya sebagai:

PESERTA

Pembicara:

Wawan Sunarjo, M.Sc

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga,
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Prof. Imas Maesaroh, M.Lib., Ph.D

Senior Product Implementator SEVIMA

Koordinator Humas
PT Sentra Vidya Utama



Ilham Dary, M.Hub.Int.





Pengelolaan PNBP di Perguruan Tinggi

Oleh Imas Maesaroh

I. Satker dalam Konteks Perguruan Tinggi

Definisi Satker

Unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dari APBN.

Keterbatasan

Semua PNBPN harus disetorkan ke ke kas negara.

Ketertanggung

Penggunaan anggaran bergantung pada pagu dalam DIPA.



Ciri Utama Satker

1 Pengelolaan Keuangan

Seluruh keuangan dikelola oleh Kementerian Keuangan.

2 Regulasi Ketat

Harus mengikuti regulasi ketat ketat dalam pengelolaan anggaran.

3 Tidak Fleksibel

Tidak memiliki fleksibilitas dalam mengelola pendapatan sendiri.



Badan Layanan Umum (BLU)

1

Status PTN-BLU

Memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dibandingkan dibandingkan Satker.

2

Pengelolaan PNBPN

Dapat mengelola PNBPN secara langsung.

3

Efisiensi

Tidak perlu menyetorkan PNBPN ke kas negara terlebih dahulu.
dahulu.





Ciri Utama BLU



Pengelolaan Langsung

Dapat mengelola PNBP
PNBP langsung untuk
kebutuhan operasional.
operasional.



Standar Akuntansi

Tetap mengikuti standar
akuntansi dan pelaporan
keuangan negara.



Fleksibilitas Anggaran

Lebih fleksibel dalam
penggunaan anggaran
anggaran untuk layanan
layanan pendidikan.

Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH)

1

Otonomi Lebih Besar

Memiliki otonomi lebih besar dalam pengelolaan keuangan dan keuangan dan akademik.

2

Pengelolaan Mandiri

Dapat mengelola sumber pendapatan sendiri.

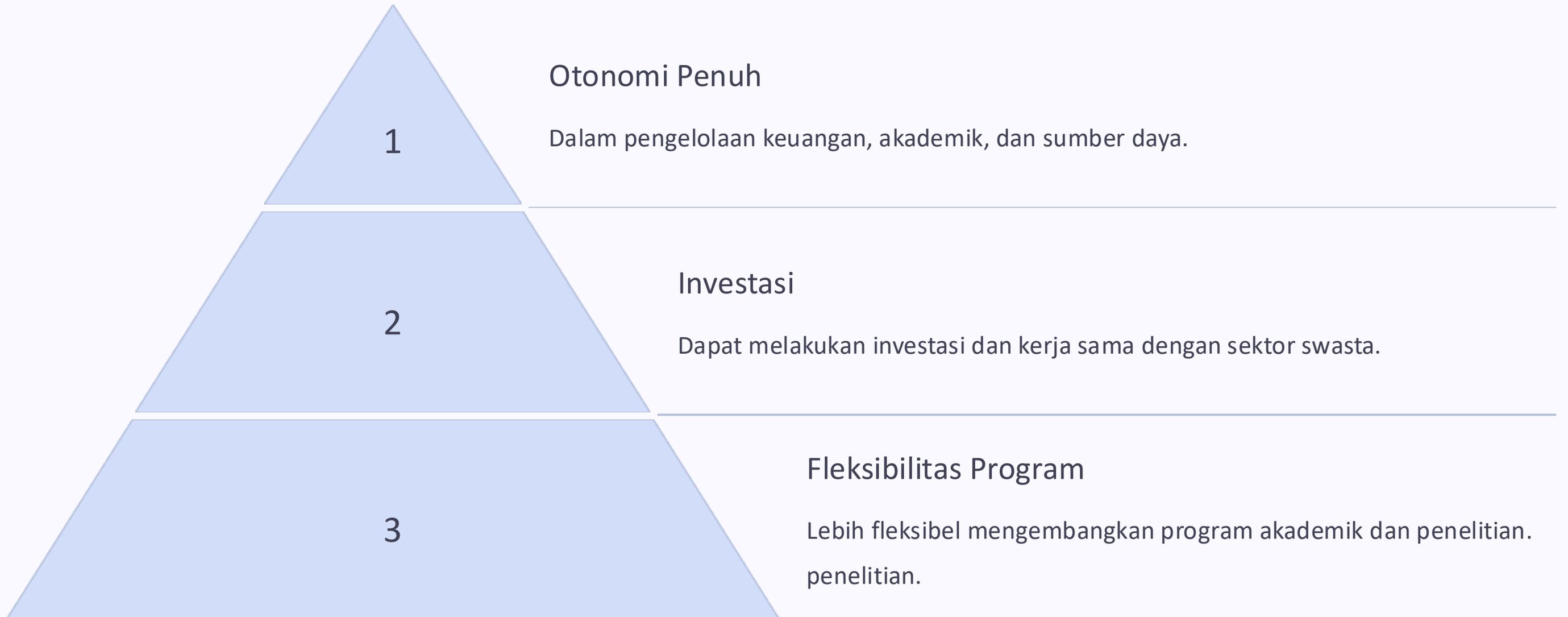
3

Sumber Dana Beragam

Termasuk PNBP, dana hibah, serta investasi.



Ciri Utama PTNBH



II. Mekanisme PNBP dalam Perguruan Tinggi

Definisi PNBP

Pendapatan dari layanan perguruan tinggi.

Sumber Pendapatan

Biaya pendidikan, penelitian, pelatihan, konsultasi.

Kerja Sama

Pendapatan dari kerja sama dengan industri.



Alur Mekanisme PNBP

Sumber PNBP

Biaya kuliah, kerja sama industri, jasa konsultasi, sewa fasilitas.

Penetapan Tarif

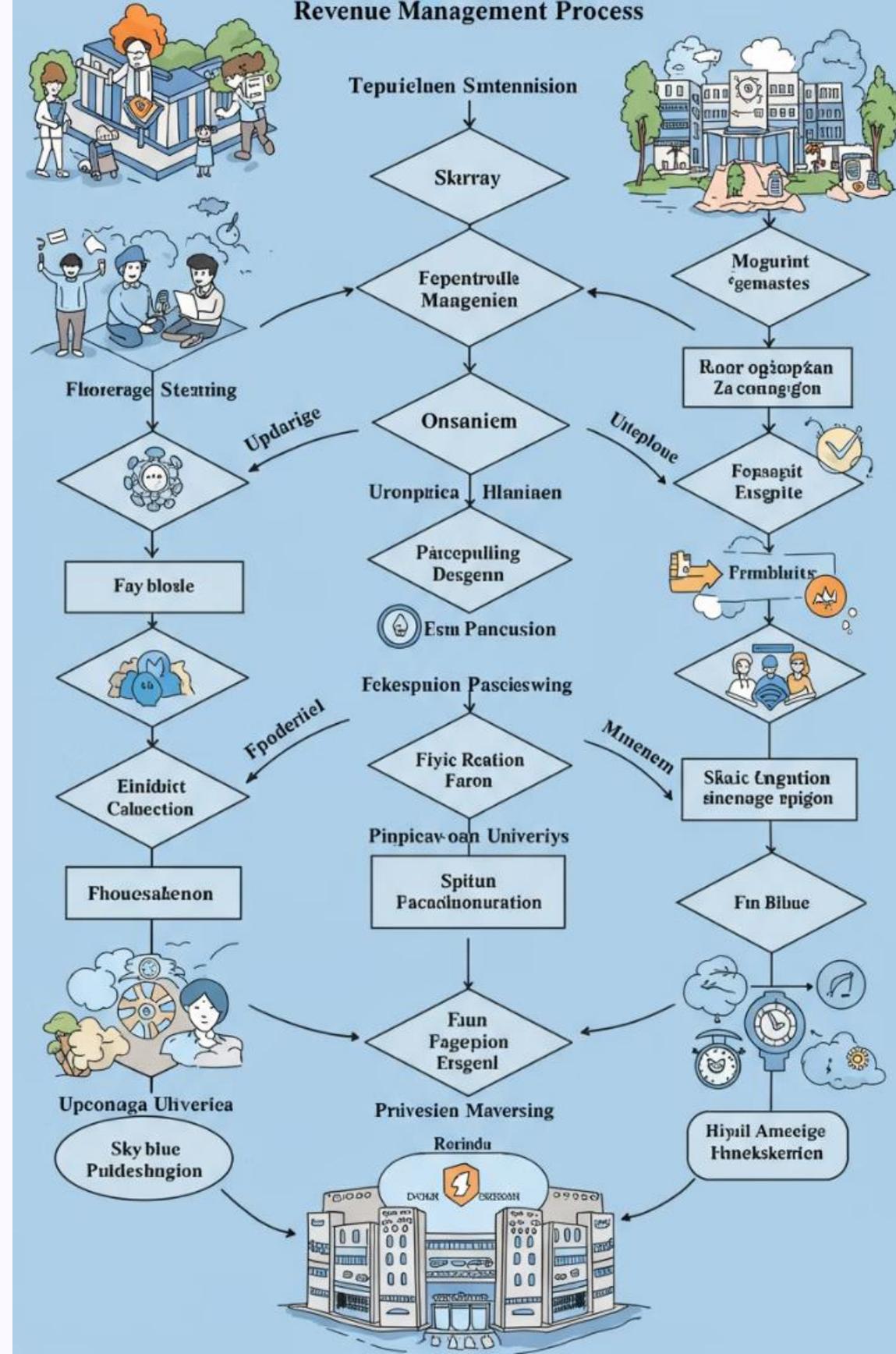
Diusulkan perguruan tinggi, disetujui Kemenkeu dan Kemendikristek.

Penyetoran dan Pengelolaan

- Satker: Harus menyetorkan PNBP ke kas negara terlebih dahulu.
- BLU: Bisa langsung mengelola PNBP untuk operasional.
- PTNBH: Memiliki kewenangan penuh dalam mengelola pendapatan pendapatan.

Penggunaan Dana

Untuk operasional, pengembangan akademik, dan penelitian.





III. Tantangan Utama Pengelolaan PNBPN



Ketergantungan pada Biaya Pendidikan

Banyak perguruan tinggi masih bergantung pada SPP/UKT sebagai sumber utama sumber utama PNBP. Hal ini membuat mereka kurang fleksibel dalam mencari mencari sumber pendapatan lain.

Regulasi yang Ketat

Proses Panjang

Pengajuan tarif PNBP memerlukan persetujuan pemerintah yang lama.

Pembatasan Penggunaan

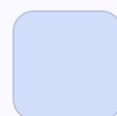
Ada pembatasan dalam penggunaan PNBP di perguruan tinggi Satker.

Birokrasi

Proses birokrasi yang rumit menghambat inovasi pengelolaan.

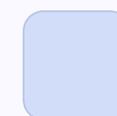


Kurangnya Inovasi dalam Sumber PNBPN



Minimnya Kerja Sama Industri

Perguruan tinggi kurang mengembangkan kerja sama sama dengan sektor industri. industri.



Aset Tidak Dimanfaatkan Dimanfaatkan

Banyak aset kampus yang belum dimanfaatkan untuk pendapatan.



Riset Tidak Komersial

Hasil riset jarang dikembangkan menjadi produk komersial.



Kendala dalam Pelaporan dan dan Transparansi



Beban Administrasi

Persyaratan akuntabilitas akuntabilitas dan pelaporan menjadi beban administrasi berat.



Tuntutan Transparansi

Kebutuhan akan transparansi yang tinggi memerlukan sistem yang baik.



Kompleksitas Sistem

Sistem pelaporan yang yang kompleks menyulitkan pengelolaan pengelolaan efisien.



Resistensi Masyarakat terhadap Kenaikan Tarif



Protes Mahasiswa

Kenaikan tarif sering mendapat penolakan penolakan dari mahasiswa.



Keberatan Orang Tua

Orang tua merasa terbebani dengan biaya biaya pendidikan tinggi.



Tekanan Media

Media sering menyoroti kenaikan biaya pendidikan secara kritis.



IV. Solusi untuk Mengatasi Kendala PNBPN

Diversifikasi Sumber PNBP

Kerja Sama Industri

Mengembangkan skema kerja sama dengan sektor swasta.

Menciptakan proyek penelitian bersama yang menguntungkan kedua pihak.

Komersialisasi Riset

Meningkatkan pendapatan dari paten dan hak cipta.

Mengembangkan riset terapan yang memiliki nilai komersial tinggi.





Optimalisasi Pemanfaatan Aset

1

Penyewaan Fasilitas

Menyewakan fasilitas kampus untuk acara dan kegiatan eksternal.

2

Bisnis Kampus

Mengelola bisnis kampus seperti rumah sakit pendidikan.

3

Pusat Pelatihan

Mengembangkan pusat pelatihan untuk umum dan profesional.

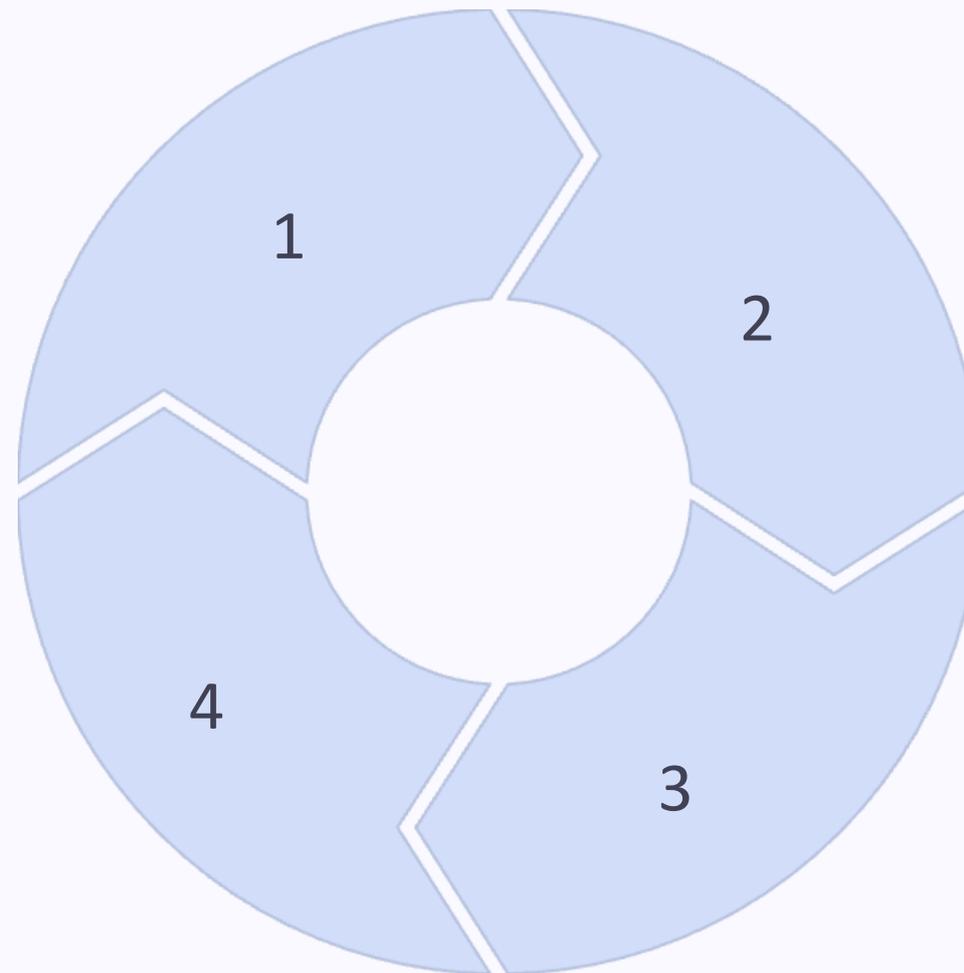
Digitalisasi dan Efisiensi Administrasi

Sistem Manajemen Keuangan

Menggunakan sistem berbasis teknologi teknologi untuk transparansi.

Analisis Data

Memanfaatkan data untuk pengambilan pengambilan keputusan.



Pelaporan Digital

Mempermudah pelaporan PNBP secara real-time.

Monitoring Otomatis

Sistem pemantauan keuangan yang terintegrasi.

Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

Sistem Audit

Meningkatkan sistem audit internal dan eksternal untuk transparansi.

Pelibatan Pemangku Kepentingan

Melibatkan stakeholders dalam perencanaan dan pengawasan PNBP.
PNBP.

Standar Operasional

Mengembangkan SOP yang jelas untuk pengelolaan keuangan.

Pelaporan Berkala

Menyusun laporan berkala yang dapat diakses publik.



Komunikasi dan Sosialisasi Tarif PNBP

1

Pelibatan Mahasiswa

Melibatkan mahasiswa dalam proses penetapan tarif.

2

Sosialisasi Manfaat

Menyampaikan manfaat dari kenaikan tarif untuk peningkatan layanan.

3

Dialog Terbuka

Mengadakan forum dialog dengan seluruh pemangku kepentingan.

4

Transparansi Penggunaan

Menjelaskan penggunaan dana secara transparan dan terukur.





Kesimpulan

1

Status Kelembagaan

Satker, BLU, dan PTNBH memiliki fleksibilitas
fleksibilitas berbeda dalam mengelola PNBP.
PNBP.

2

Solusi Utama

Diversifikasi pendapatan, transparansi, dan
dan optimalisasi aset.

3

Tujuan Akhir

Kemandirian finansial tanpa membebani
membebani mahasiswa dan masyarakat.
masyarakat.

Terima Kasih

Imas.kholis@gmail.com

081216164375

